



bkkbn



unisa  
Universitas 'Aisyiyah  
Yogyakarta

Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA

UNGGUL

# **POLICY BRIEF**

## **KADER DAN POSYANDU GARDA TERDEPAN DALAM MENURUNKAN ANGKA STUNTING**

Oleh : Cesa Septiana Pratiwi, Witriastuti Susani  
Anggraeni, Istiqomah Pattimura, Lisna Nur'anisyah,  
Nabila Seilla Augusta, Septiana Ade Ammalia, Metty  
Tsabitah Aziz

(Magister Kebidanan Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta)

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Stunting merupakan permasalahan kesehatan yang dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia. Stunting juga merupakan masalah nasional yang saat ini mendapatkan perhatian khusus di Indonesia (Dewi Satiti & Amaliaia, 2020). Meskipun ada upaya global untuk mengurangi prevalensi stunting, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai target penurunan. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), prevalensi stunting mengalami variasi antar kabupaten, menunjukkan perlunya intervensi yang terfokus dan terkoordinasi. Upaya penurunan angka stunting memerlukan peran serta seluruh unsur pentahelix yang diantaranya pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan kelompok masyarakat. Posyandu, sebagai pondasi kesehatan masyarakat, memiliki peran penting dalam pencegahan stunting. Salah satu pihak yang juga berperan penting untuk mengatasi stunting ini adalah kader posyandu, dimana kader sebagai kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan posyandu (Hamdy et al., 2023).

# Pendahuluan

Stunting pada masa kanak-kanak adalah salah satu hambatan paling signifikan pada perkembangan manusia (WHO, 2014). Stunting memiliki dampak jangka panjang pada individu dan masyarakat, termasuk perkembangan kognitif dan fisik yang terhambat, kapasitas produktif yang berkurang, kesehatan yang buruk, serta peningkatan risiko penyakit degeneratif seperti diabetes (Haskas, 2020).

Meskipun secara global prevalensi stunting telah menurun 10 tahun terakhir, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengurangi angka stunting. Pada tahun 2022, sekitar 148,1 juta anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting secara nasional (WHO, 2023). Di Indonesia, prevalensi stunting pada tahun 2023 mencapai 21,6%, dengan target penurunan menjadi 14% pada tahun 2024 (Rakornas, 2023). Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia, prevalensi stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2022 tercatat sebesar 16,4%, namun angka ini meningkat menjadi 18% pada tahun 2023. Peningkatan prevalensi stunting ini tidak merata di seluruh DIY. Kabupaten Sleman dan Gunung Kidul berhasil menurunkan prevalensi stunting. Sedangkan, Kota Yogyakarta, Bantul, dan Kulon Progo mengalami peningkatan prevalensi stunting. Kondisi ini menjadi dasar dilakukannya intervensi serentak pencegahan stunting yang telah diatur dalam Surat Edaran Kemendagri No 400.5.3/3151/BANGDA yang kemudian di tindaklanjuti oleh BKKBN melalui Surat Edaran Kepala BKKBN No. 3 Tahun 2024 tentang dukungan pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting di seluruh Indonesia.

Menanggapi dua surat edaran tersebut, BKKBN DIY melaksanakan intervensi serentak pencegahan stunting tersebut. Bersamaan dengan Praktik Pemberdayaan dalam Praktik Kebidanan, mahasiswa Magister Kebidanan angkatan XI dari Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta terlibat langsung untuk mengevaluasi kendala yang dihadapi kader posyandu dalam pelaksanaan intervensi serentak pencegahan stunting.

Posyandu sebagai wadah kesehatan berbasis masyarakat berperan penting dalam pencegahan stunting, dengan kader posyandu sebagai penggerak utama yang memastikan pemantauan status gizi balita secara rutin setiap bulannya (Indriati, 2023). Kader memiliki peran dalam menjalankan program pemerintah yaitu kegiatan posyandu, dimana kader sebagai kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan posyandu (Didah, 2020). Dalam kerangka peran pentahelix, keterlibatan kader posyandu menjadi sangat krusial dalam upaya mengatasi masalah stunting (Aditya & Purnaweni, 2017). Kader posyandu dan perangkat desa merupakan tokoh yang sangat strategis untuk dijadikan sebagai pihak yang dapat membantu menangani masalah stunting sesuai dengan kapasitasnya (Rahmadi et al., 2023).

## Hasil/Permasalahan

Untuk mendeteksi dini dan pencegahan terjadinya stunting, diperlukan kerjasama dari berbagai stakeholder, terutama yang ada kaitannya dengan gizi dan kesehatan anak. Stakeholder yang terlibat tidak hanya tenaga kesehatan namun juga bisa tenaga kader dan perangkat desa. Kader posyandu dan perangkat desa sebagai orang yang dekat dan banyak berinteraksi dengan masyarakat dan menjadi perpanjangan tangan petugas kesehatan dalam hal penanganan masalah kesehatan ibu dan anak yang terdapat di masyarakat. Kader posyandu dan perangkat desa merupakan tokoh yang sangat strategis untuk dijadikan sebagai pihak yang dapat membantu menangani masalah stunting sesuai dengan kapasitasnya (Rahmadi et al., 2023). Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya optimalisasi peran kader dan posyandu untuk percepatan penurunan stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Umbulharjo I dan II adalah:

## Kurangnya Kepercayaan Diri Kader

- Beberapa kader posyandu merasa kurang percaya diri dalam melakukan penimbangan dan pengukuran. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran terhadap akurasi hasil pengukuran dan respons negatif dari orang tua balita. Kader sering kali merasa tertekan saat menghadapi keraguan dan keluhan dari masyarakat terkait pengukuran yang mereka lakukan.

## Pemeliharaan Alat untuk Akurasi Hasil Pengukuran

- Alat-alat pengukuran seperti timbangan dan alat ukur tinggi badan memerlukan pemeliharaan yang rutin agar hasilnya akurat. Beberapa alat-alat di posyandu tidak menunjukkan hasil yang akurat dikarenakan belum terkalibrasi dengan baik atau tidak diperiksa secara berkala, yang dapat mempengaruhi keakuratan data stunting yang dikumpulkan.

## Keterbatasan Pendanaan Kegiatan Posyandu

- Beberapa posyandu menghadapi keterbatasan dana untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan program-program mereka. Bahkan, para kader tidak jarang harus mengeluarkan dana dari kantong pribadi untuk memenuhi kebutuhan operasional posyandu. Untuk menutupi kekurangan ini, masyarakat sekitar juga melakukan pengumpulan dana swadaya setiap bulannya. Meskipun dukungan dari pemerintah, instansi lain yang terkait, serta pelaku usaha sangat diharapkan, keberlangsungan dan pengembangan posyandu tidak sepenuhnya bergantung pada sumber tersebut. Berdasarkan klasifikasi, posyandu dapat dikelompokkan menjadi beberapa tingkatan yaitu pratama, madya, purnama, mandiri. Klasifikasi posyandu seringkali ditentukan oleh seberapa baik mereka dapat mengelola dana dan sumber daya mereka sendiri. Setiap tingkatan posyandu menunjukkan tingkat kualitas pengelolaan dan pemanfaatan dana serta sumber daya yang ada untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat.

## Regenerasi Kader

- Banyak kader posyandu yang saat ini sudah berusia lanjut, sehingga diperlukan regenerasi untuk memastikan keberlanjutan program. Kader muda biasanya memiliki keterbatasan waktu dikarenakan pekerjaan dan keluarga sehingga tidak dapat terlibat aktif dalam kegiatan posyandu.

## Dukungan dan Kolaborasi Masyarakat, Puskesmas, dan Instansi Lain dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting

- Percepatan penurunan angka stunting memerlukan dukungan dan kolaborasi yang kuat antara masyarakat, puskesmas, dan berbagai instansi terkait. Tetapi, sering kali tantangan terbesar yang dihadapi posyandu adalah kurangnya dukungan yang memadai dari instansi pemerintah dan non-pemerintah dalam menyediakan sumber daya, kebijakan, dan program-program yang mendukung upaya ini. Dukungan lintas sektor sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak secara optimal. Dengan adanya kerjasama yang harmonis antara masyarakat, puskesmas, dan berbagai instansi, diharapkan target penurunan stunting dapat tercapai dengan lebih cepat dan efektif.

## Tantangan Posyandu di Wilayah Perkotaan

- Posyandu sudah berupaya untuk mengatur jadwal layanan di sore hari, tujuannya agar ibu yang bekerja tetap dapat membawa anak-anak mereka untuk mendapatkan layanan di posyandu. Tetapi masih banyak ibu yang tidak hadir ke posyandu dengan berbagai alasan salah satunya adalah mereka sudah memiliki dokter keluarga. Balita yang tidak hadir di posyandu diminta untuk menimbang dan mengukur tinggi badan serta lingkaran lengan atas (LILA) di rumah, kemudian hasil pengukuran tersebut dikirimkan kepada kader posyandu. Proses pengukuran yang tidak dilakukan secara langsung di posyandu dimungkinkan dapat menimbulkan ketidakakuratan data, yang pada akhirnya bisa mempengaruhi status gizi anak yang dilaporkan. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi posyandu di daerah perkotaan dalam menarik partisipasi aktif masyarakat.

# Rekomendasi Kebijakan

Agar program intervensi serentak percepatan penurunan stunting dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan harapan, diperlukan beberapa strategi yang terfokus dan terkoordinasi dengan baik. Rekomendasi kebijakan ini kami susun untuk Pemerintah Daerah dan Pusat, BKKBN, Dinas Kesehatan, Puskesmas, serta layanan kesehatan, akademisi dan peneliti, pelaku usaha dan industri, serta masyarakat sebagai pihak yang terlibat langsung dalam upaya percepatan penurunan stunting. Rekomendasi tersebut meliputi:

**Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu tentang Antropometri, Pemantauan Pertumbuhan dan Makanan Balita Melalui Pelatihan dan Pendampingan dalam Rangka optimalisasi percepatan penurunan stunting.**

Kader posyandu berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan kegiatan penimbangan dan pengukuran balita. Kegiatan ini merupakan indikator utama dalam menentukan status stunting pada anak. Kader dilatih untuk secara akurat melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan, yang kemudian menjadi data penting dalam menentukan kebijakan dan intervensi dalam upaya optimalisasi penurunan stunting Indonesia khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Topik pelatihan lain bagi kader yang juga diperlukan, namun sering terlupakan adalah Teknik Advokasi. Teknik advokasi yang diperlukan oleh kader posyandu data berupa: Komunikasi Efektif yang meliputi strategi untuk berkomunikasi dengan masyarakat, orang tua, dan pemerintah setempat tentang pentingnya penanganan stunting serta upaya untuk mobilisasi sumber daya di mana, kader dapat mempelajari cara mengakses dan memanfaatkan sumber daya dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk mendukung program pencegahan stunting di posyandunya

## Optimalisasi Pendanaan untuk Kegiatan Posyandu

Dukungan dana merupakan aspek krusial dalam kelancaran operasional posyandu. Dana yang memadai memastikan bahwa semua kegiatan, termasuk penimbangan, pengukuran, penyuluhan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya dapat dilakukan dengan optimal. Dana ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk pemerintah, lembaga swasta, dan swadaya masyarakat. Sebagai contoh dalam hal pendanaan BBKBN DIY berhasil merealisasikan pemberian 2 telur sehari dari pengajuan dana keistimewaan untuk keluarga berisiko stunting. Selain itu, harapannya dapat diadakan pelatihan manajemen pendanaan posyandu agar seluruh posyandu dapat mencapai tingkat klasifikasi mandiri, sehingga program posyandu memiliki tumpuan kuat pada swadaya masyarakat yang terorganisir dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan pengelolaan dana yang efektif dan pemanfaatan sumber daya yang optimal, posyandu dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan dampak yang signifikan dalam upaya penurunan stunting dan peningkatan kesehatan balita di Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian menunjukkan bahwa insentif berperan penting dalam memotivasi kader. Insentif dalam bentuk uang dapat menjadi daya tarik bagi kader untuk tetap aktif dan terlibat dalam kegiatan posyandu, serta mendorong partisipasi yang lebih tinggi (Usman, 2024). Sebagai upaya mendorong partisipasi kader, insentif bagi kader perlu dipertimbangkan adanya karena terdapat kesulitan dalam regenerasi kader. Selain itu, pemberian reward kepada kader posyandu yang berperan aktif dalam deteksi dini stunting dan stimulasi tumbuh kembang anak dapat memotivasi kader lain untuk meningkatkan kinerja mereka (Sari et al., 2021).

Peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kader kesehatan dalam mencegah risiko stunting dapat dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, terutama Puskesmas, yang menyediakan edukasi berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi rutin oleh Puskesmas terhadap kader kesehatan mencakup pelaksanaan penimbangan, deteksi status gizi, serta stimulasi tumbuh kembang anak. Optimalisasi pelaporan dilakukan dengan cara pencatatan yang efektif dan jelas, serta kecepatan dalam penyampaian laporan hasil deteksi dini kepada bidan desa atau Puskesmas (Sari et al., 2021).

**Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu tentang Antropometri, Pemantauan Pertumbuhan dan Makanan Balita Melalui Pelatihan dan Pendampingan dalam Rangka optimalisasi percepatan penurunan stunting.**

### **Pemeliharaan Alat untuk Akurasi Hasil Pengukuran**

Untuk memastikan akurasi hasil pengukuran dalam upaya percepatan penurunan stunting, diperlukan perhatian khusus pada pemeliharaan alat-alat pengukuran seperti program kalibrasi rutin yang dilaksanakan enam bulan sekali sebelum dilakukannya posyandu, pelatihan teknis untuk Kader tentang cara penggunaan dan pemeliharaan alat pengukuran, audit inspeksi alat berkala, dan mekanisme pelaporan dan pemeliharaan alat-alat di posyandu serta tindak lanjut yang cepat dari puskesmas dan dinas Kesehatan jika terdapat laporan kerusakan atau ketidaksesuaian alat ukur dari kader dan posyandu. Hal ini dikarenakan pengukuran dan alat ukur yang tidak tepat dapat menimbulkan bias dalam penilaian status gizi anak dan mempengaruhi intervensi yang diberikan. Ketidakakuratan dalam pengukuran tinggi badan anak, seperti menggunakan alat pengukur yang tidak akurat atau tidak sesuai prosedur standar, dapat menghasilkan data stunting yang tidak akurat (Rahmadi et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan SOP yang mengatur prosedur pelaporan dan perawatan alat serta sosialisasinya kepada kader dan pihak terkait agar pemeliharaan alat memiliki alur yang jelas, sehingga memudahkan kader dan pihak terkait dalam pengelolaannya.

Penguatan kolaborasi, peran, dan kontribusi seluruh unsur pentahelix yang meliputi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan kelompok masyarakat sangat penting dalam upaya percepatan penurunan stunting

Agar program intervensi serentak percepatan penurunan stunting dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan hasil yang diharapkan, diperlukan beberapa strategi dalam pencapaiannya, yaitu:

## 1 Pemerintah

Dalam pembuatan kebijakan, diperlukan evaluasi yang cermat dari tingkat pusat hingga ke posyandu, terutama dalam hal pendanaan, salah satunya anggaran pendanaan yang tepat sasaran seperti pengadaan PMT untuk memastikan program-program dapat berjalan secara optimal dan efisien. Selain itu, kebijakan wajib posyandu perlu diperkuat agar memudahkan kader dalam mengumpulkan masyarakat, terutama di wilayah perkotaan yang cenderung padat dan memiliki tantangan tersendiri dalam mengorganisir kegiatan kesehatan masyarakat. Penguatan kebijakan ini dapat mencakup peningkatan fasilitas dan dukungan bagi posyandu, serta penyediaan insentif yang mendorong partisipasi aktif dari kader dan masyarakat dalam kegiatan pemantauan kesehatan di posyandu. Pelaksanaan posyandu juga dapat dikolaborasikan dengan layanan Bina Keluarga Balita (BKB) yang diinisiasi oleh BKKBN. Kolaborasi ini akan memperluas jangkauan layanan kesehatan dan pendidikan bagi keluarga balita. Dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada dan sinergi antar program, posyandu dapat lebih efektif dalam memberikan layanan kesehatan yang holistik kepada masyarakat. Ini juga memungkinkan peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan memperluas cakupan program-program kesehatan masyarakat secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

## 2 Akademisi

Kolaborasi, peran, dan kontribusi akademisi sangat penting untuk ditingkatkan dalam upaya penanggulangan stunting. Hasil studi yang berkaitan dengan stunting dapat menjadi landasan utama dalam merumuskan kebijakan pemerintah yang efektif dan efisien. Dengan melibatkan akademisi, dapat dipastikan bahwa kebijakan yang diambil didasarkan pada bukti ilmiah yang kuat dan terkini, sehingga mampu memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi prevalensi stunting di masyarakat.

## 3 Pelaku Usaha

Kolaborasi, peran, dan kontribusi dari pelaku usaha seperti UMKM dan industri sangat penting dalam menyediakan PMT dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung intervensi serentak dalam percepatan penurunan stunting.

## 4

### Media

Promosi pencegahan dan penanganan stunting melalui media perlu ditingkatkan sebagai upaya untuk mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat. Peningkatan promosi di media mengenai pencegahan dan penanganan stunting penting untuk memastikan informasi tersebar luas dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya pencegahan serta penanganan stunting dapat meningkat, yang pada akhirnya akan membantu mengurangi prevalensi stunting di berbagai wilayah.

## 5

### Kelompok Masyarakat

Kelompok masyarakat seperti posyandu, yang bertujuan untuk memantau tumbuh kembang anak, perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius. Hal ini mencakup pemenuhan sarana dan prasarana posyandu yang memadai serta sistem pemantauan yang efektif. Selain itu, diperlukan pemberian insentif kepada kader posyandu untuk meningkatkan semangat dan kerja mereka, serta menarik keterlibatan ibu muda sebagai kader penerus. Upaya ini penting untuk memaksimalkan peran posyandu dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, terutama dalam upaya penurunan angka stunting.

Instansi-instansi yang termasuk dalam unsur pentahelix tidak hanya berperan sebagai penyedia pelatihan dan bimbingan bagi kader posyandu, tetapi juga memberikan dukungan teknis dan sumber daya yang diperlukan. Kolaborasi, peran, dan kontribusi dari unsur pentahelix ini memiliki potensi besar untuk memperkuat kapasitas posyandu dalam menjalankan program-program kesehatan dan pemberdayaan masyarakat secara efektif. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, dan kelompok masyarakat, posyandu dapat lebih efisien dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta meningkatkan dampak positifnya dalam upaya penurunan angka stunting.

# Referensi

Aditya, D., & Purnaweni, H. (2017). Implementasi Program Perbaikan Gizi Balita di Puskesmas Wonosalam Kabupaten Demak. *Journal Of Public Policy and Management Review*, 6(2), 43–52.

Dewi Satiti, I. A., & Amaliaia, W. (2020). Optimalisasi Peran Kader dalam Prgram “Generasi Bebas Stunting” di Desa Bendosari, Kecamatan Pujon. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 5(1), 48–51. <https://doi.org/10.33366/japi.v5i1.1489>

Hamdy, M. K., Rustandi, H., Suhartini, V., Koto, R. F., Agustin, S. S., Syifa, C. A., Arhabi, A., Baskara, V. A., Refiandinova, F., & Syauqi, A. (2023). Peran Kader Posyandu dalam Menurunkan Angka Stunting. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)*, 4(2). <https://doi.org/10.15408/jisi.v4i2.37128>

Haskas, Y. (2020). Gambaran Stunting Di Indonesia: Literatur Review. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis*, 15(2), 2302–2531.

Indriati, M. (2023). Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Dalam Mendeteksi Dan Mencegah Stunting. *Jurnal Abdi Masada*, 4(1), 1–4. <https://doi.org/10.38037/am.v4i1.66>

Rahmadi, A., Rusyantia, A., & Wahyuni, E. S. (2023). Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu tentang Antropometri, Pemantauan Pertumbuhan dan Makanan Balita Melalui Pelatihan dan Pendampingan dalam Rangka Pencegahan Stunting di Desa Sukamenanti, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(6), 1811–1818. <https://doi.org/10.54082/jamsi.1027>

Rakornas. (2023). Rakornas 2023: Pastikan Prevalensi Stunting Turun Menjadi 14% Pada Tahun 2024. <https://stunting.go.id/rakornas-2023-pastikan-prevalensi-stunting-turun-menjadi-14-pada-tahun-2024/>

Sari, D. W. P., Wuriningsih, A. Y., Khasanah, N. N., & Najihah, N. (2021). Peran kader peduli stunting meningkatkan optimalisasi penurunan risiko stunting. *NURSCOPE: Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ilmiah Keperawatan*, 7(1), 45. <https://doi.org/10.30659/nurscope.7.1.45-52>

Usman, S. (2024). Pengetahuan, Dana Insentif, Sarana Dan Prasarana Dengan Partisipasi Kader Dalam Pelaksanaan Posyandu.

WHO. (2014). Global nutrition targets 2025: Stunting policy brief. World Health Organization.

WHO. (2023). Levels and trends in child malnutrition. World Health Organization.